

ANALISIS IMPLEMENTASI MODEL HYBRID TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH

Muslim^{1(*)}, Saiful Bahri², Munawar³

Universitas Almuslim Bireuen, Indonesia¹²³

Email: muslim.cut73@gmail.com, saifulbahri@umuslim.ac.id, munawar@umuslim.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of inclusive education policy at the primary school level in Bireuen Regency, focusing on the form of implementation, the policy-practice gap, and strategies for strengthening future implementation. The study is grounded in the increasing demand for inclusive education as mandated by national policy, which, in practice, continues to face structural and technical challenges at the school level. This research employs a qualitative approach using a multiple case study design involving four public primary schools in Bireuen Regency. Data were collected through in-depth interviews with school principals as key informants, supported by document analysis and literature review. The data were analyzed thematically using the policy implementation framework of Sabatier and Mazmanian, which includes the dimensions of problem tractability, the ability of policy to structure implementation, and nonstatutory external variables. The findings indicate that inclusive education policy has generally succeeded in expanding access for students with special needs, whose characteristics are predominantly within the mild to moderate spectrum. However, implementation remains largely initiative-driven at the school level, with significant limitations in the availability of special education teachers, teachers' pedagogical capacity, and the absence of standardized operational procedures. Furthermore, variations in service quality across schools are evident, influenced by differences in leadership commitment, resource availability, and the lack of institutionalized external support networks. The gap analysis reveals that the primary challenges are not rooted in social resistance, but rather in technocratic weaknesses, including deficits in resources, implementer capacity, and local policy structures. Therefore, this study proposes an adaptive model of inclusive education implementation that emphasizes strengthening teacher capacity, institutionalizing inclusive practices at the school level, and developing cross-sectoral collaboration networks as key prerequisites for effective policy implementation.

Keywords: Inclusive Education, Policy Implementation, Policy-Practice Gap, Primary Education, Sabatier And Mazmanian.

(*) Corresponding Author: Muslim.

PENDAHULUAN

Pemerintah Aceh pertama kali mendeklarasikan diri sebagai provinsi penyelenggara pendidikan inklusif pada 21 Desember 2013, sekaligus menempatkan diri sebagai salah satu dari 5 provinsi pelopor penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia (Serambi Indonesia, 2013). Deklarasi ini dapat dikatakan sebagai tindak lanjut komitmen pemerintah Aceh terhadap pendidikan inklusif, setelah sebelumnya mengeluarkan Pergub Aceh No.92/2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif,

serta menggelontorkan bantuan dana operasional maupun peralatan untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan sekolah luar biasa (SLB) sebagai sekolah rujukan, termasuk melatih guru dan menyediakan beasiswa untuk calon guru pendidikan luar biasa (PLB). Bahkan selama 2013, sebanyak 9 kabupaten/kota di Aceh telah menjadi proyek percontohan (pilot project) penyelenggaraan pendidikan inklusi di Aceh (Solider.id, 2013).

Aceh tidaklah serta-merta begitu saja menerapkan pendidikan inklusif, ada proses panjang yang melatarbelakangi munculnya dukungan Pemerintah Aceh terhadap pendidikan inklusif dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Upaya memasyarakatkan pendidikan inklusif tersebut bahkan dirintis di Aceh sejak 2006, seiring masuknya bantuan kemanusiaan nasional dan internasional dalam fase rehab-rekon 2005–2009. Pemerintah Aceh membuka jalan kerja sama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun nasional, mengirimkan beberapa mahasiswa untuk menuntut ilmu di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus dan sebagainya. Kolaborasi ini berbuah lahirnya Qanun No.5/2008 tentang penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodasi pendidikan inklusif bagi penduduk Aceh usia sekolah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial serta yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Qanun ini terasa sangat istimewa karena Aceh tercatat menjadi satu dari beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang memiliki aturan daerah yang sangat berpihak kepada anak berkebutuhan khusus (Meutia, 2014).

Selama masa pilot 2007–2010 saja, koordinator program Helen Keller International (HKI) untuk Aceh, Said Jufri mencatat sudah ada sekitar 100 sekolah mulai menerapkan pendidikan inklusif yang tersebar di 8 kabupaten/kota yang melayani sekitar 20.000 murid baik reguler maupun berkebutuhan khusus (Harian Andalas, 2011). Sekitar 75 orang guru pembimbing khusus (GPK) telah dilatih (Kompas.com, 2009). HKI bahkan mengangkat Aceh menjadi daerah percontohan pendidikan inklusif untuk Sumatera (ANTARA, 2010).

Dari selayang pandang di atas, jelas bahwa pendidikan inklusif bukanlah hal baru untuk Aceh. Jika dihitung dari 2006, maka 19 tahun sudah usianya, sejak pertama kali dibahas diantara pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga lokal, nasional maupun internasional. Namun, usia program yang cukup lama itu tidak bermakna pelaksanaannya sudah memuaskan. Mengutip pernyataan Sekretaris Daerah Aceh 2013–2019, Dermawan, menyebutkan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Aceh bukanlah hal yang baru, hanya saja harus diakui bahwa cara pengajaran dan penerapan kurikulum bagi mereka belum maksimal (Harian Waspada, 2018). Senada dengan pernyataan tersebut, Haekal (2021) menyebut kendala dalam implementasi pendidikan inklusif di Aceh tersebut berupa tantangan dalam merumuskan kurikulum inklusif yang sesuai bagi seluruh peserta didik, manajemen kelas, serta masalah yang lebih mendasar seperti kurangnya guru berlatar-belakang keilmuan Pendidikan Luar Biasa.

Kabupaten Bireuen, sebagai salah satu daerah di Provinsi Aceh, telah menunjukkan komitmen yang cukup progresif dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pada 2014, Bireuen menetapkan regulasi khusus melalui Peraturan Bupati Bireuen No. 22 Tahun 2014 yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif, serta SK Bupati No. 11 Tahun 2014 yang menetapkan 22 SD sebagai sekolah inklusi, dengan jumlah siswa inklusif sebanyak 607 anak. Hal ini menjadikan Bireuen sebagai kabupaten pertama di Aceh yang menerima penghargaan penyelenggara pendidikan inklusi terbaik (Harian Analisa, 2016).

Namun demikian, kajian empiris menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala di tingkat implementasi. Hasil penelitian Ferizaldi & Fazlina (2020) menyorot 4 faktor yang menghambat kesuksesan

implementasi pendidikan inklusif di kabupaten Bireuen: (1) Sumber daya pelaksana, tidak berasal dari background pendidikan inklusif/luar biasa, hanya guru honorer biasa yang ditugaskan; (2) Minimnya sarana dan prasarana untuk kelas inklusif di Kabupaten Bireuen karena faktor anggaran, dimana kabupaten Bireuen mengalokasikan 63% untuk aparatur dan hanya 37% untuk publik, sehingga tenaga pengajar atau guru pendidik murid disabilitas merasa kewalahan karena hanya dapat menggunakan metode sederhana tanpa menggunakan alat bantu atau transmisi untuk murid berkebutuhan khusus tersebut; (3) Masih ada banyak resistensi dari berbagai kalangan baik dari sekolah, guru dan orang tua murid; dan (4) Belum adanya kerja sama yang baik antara pihak-pihak pelaksana kebijakan sehingga materi pembelajaran yang disampaikan pun belum terealisasi secara maksimal.

Uraian diatas menunjukkan, meskipun kebijakan telah tersedia secara formal, namun keberhasilan implementasi masih membutuhkan penguatan lanjutan, seperti kapasitas aktor pelaksana, konteks sosial-politik, serta struktur program itu sendiri. Ini sejalan dengan pandangan Sabatier & Mazmanian (1980: 1983) yang menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan tujuan, sumber daya aktor pelaksana, dan dukungan politik serta sosial dari lingkungan pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian ini juga memanfaatkan kerangka teori Model Implementasi Sabatier & Mazmanian (1980) sebagai acuan dalam merancang struktur variabel dan instrumen penelitian. Kerangka ini menekankan pada tiga komponen penting dalam implementasi kebijakan, yaitu: (1) Karakteristik masalah (tractability of the problem), (2) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan implementasi (ability to structure implementation), dan (3) Faktor-faktor eksternal non-hukum (nonstatutory variables). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Lokasi pengumpulan data difokuskan pada 4 Sekolah Dasar yang diketahui merupakan penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen. Penelitian menghabiskan waktu selama 3 (tiga) bulan antara 2 Januari – 31 Maret 2026, terhitung sejak izin pertama sekali dikeluarkan pihak universitas hingga selesainya dokumen hasil akhir penelitian. Adapun kategori informan dalam penelitian ini meliputi: Kepala sekolah dari SD yang ditetapkan sebagai sekolah inklusif melalui SK Bupati Bireuen No. 11 Tahun 2014; Guru kelas reguler yang mengajar siswa berkebutuhan khusus (ABK); Guru Pembimbing Khusus (GPK); Pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen, khususnya yang menangani pendidikan dasar dan layanan inklusi; dan Orang tua siswa ABK.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan analisis dokumen. Untuk memastikan keabsahan (validitas) data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan trustworthiness yang meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Lincoln & Guba, 1985). Analisis dilakukan melalui tiga komponen utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model Konseptual Revisi Sabatier–Mazmanian

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Sabatier dan Mazmanian menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel utama, yaitu karakteristik masalah yang dihadapi (tractability of the problem), kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi (ability of policy

decision to structure implementation), serta faktor eksternal yang tidak secara langsung diatur dalam kebijakan (nonstatutory variables affecting implementation). Ketiga dimensi tersebut secara bersama-sama menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan melalui proses implementasi di lapangan.

Hasil penelitian mengenai implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa kerangka konseptual Sabatier dan Mazmanian pada dasarnya masih relevan untuk menjelaskan dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal. Namun demikian, temuan empiris juga menunjukkan adanya satu faktor kunci yang tidak secara eksplisit terartikulasikan dalam model asli, yaitu kapasitas implementasi di tingkat satuan pendidikan (school implementation capacity).

Dalam praktik implementasi pendidikan inklusif di wilayah penelitian, sekolah merupakan unit organisasi yang memegang peran sentral dalam menerjemahkan mandat kebijakan menjadi layanan pendidikan yang nyata. Meskipun regulasi nasional telah menetapkan prinsip-prinsip dasar pendidikan inklusif, kemampuan kebijakan tersebut untuk menghasilkan outcome yang efektif sangat bergantung pada kapasitas organisasi sekolah dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Kapasitas ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain kompetensi profesional guru, kepemimpinan kepala sekolah, ketersediaan sumber daya pendukung, serta kemampuan sekolah dalam membangun jejaring kerja sama dengan berbagai aktor eksternal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa variasi dalam kualitas implementasi pendidikan inklusif antar sekolah di Kabupaten Bireuen sebagian besar dapat dijelaskan oleh perbedaan kapasitas implementasi tersebut. Sekolah yang memiliki kepemimpinan yang lebih proaktif, guru yang lebih adaptif, serta komunikasi yang lebih baik dengan orang tua cenderung mampu mengembangkan praktik pendidikan inklusif yang lebih efektif, meskipun dukungan struktural dari sistem kebijakan masih terbatas. Sebaliknya, sekolah dengan kapasitas organisasi yang lebih rendah menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan mandat kebijakan menjadi praktik pembelajaran yang adaptif bagi siswa berkebutuhan khusus.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan suatu reinterpretasi terhadap model implementasi Sabatier dan Mazmanian dengan menempatkan kapasitas implementasi sekolah sebagai variabel mediator yang menghubungkan desain kebijakan dengan hasil implementasi di lapangan. Dalam model konseptual yang direvisi ini, kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan implementasi tidak secara otomatis menghasilkan outcome kebijakan, melainkan terlebih dahulu diproses melalui kapasitas organisasi pada tingkat pelaksana kebijakan.

Dengan demikian, hubungan antar variabel dalam model implementasi dapat dipahami sebagai suatu proses berjenjang. Karakteristik masalah pendidikan inklusif mempengaruhi kompleksitas implementasi kebijakan, sementara desain kebijakan memberikan kerangka regulatif bagi pelaksanaan program. Namun efektivitas kebijakan tersebut pada akhirnya sangat ditentukan oleh kapasitas implementasi di tingkat sekolah, yang berfungsi sebagai ruang di mana berbagai keputusan operasional, adaptasi pembelajaran, serta interaksi antara guru dan siswa berlangsung secara nyata.

Selain itu, faktor eksternal non-hukum seperti dukungan masyarakat, komitmen kebijakan daerah, serta keberadaan jejaring organisasi pendukung juga tetap memainkan peran penting dalam memperkuat atau melemahkan kapasitas implementasi tersebut. Dengan kata lain, faktor eksternal tidak hanya mempengaruhi implementasi secara langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan sekolah dalam mengembangkan praktik pendidikan inklusif yang efektif.

Berdasarkan analisis tersebut, model konseptual revisi Sabatier–Mazmanian dalam konteks implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen dapat dirumuskan sebagai suatu kerangka implementasi yang menempatkan kapasitas sekolah sebagai

simpul utama dalam proses implementasi kebijakan. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah, tetapi juga pada kemampuan institusi pendidikan di tingkat lokal dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik pembelajaran yang adaptif.

Dengan demikian, kontribusi konseptual dari penelitian ini terletak pada penegasan bahwa dalam konteks kebijakan pendidikan yang bersifat operasional di ruang kelas, kapasitas implementasi organisasi pelaksana menjadi variabel penghubung yang sangat menentukan antara desain kebijakan dan outcome implementasi. Perspektif ini memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai bagaimana model implementasi kebijakan dapat diterapkan pada sektor pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar.

Diagram Model Konseptual Implementasi Pendidikan Inklusif Adaptif

Berdasarkan sintesis temuan empiris penelitian dan reinterpretasi terhadap model implementasi kebijakan Sabatier–Mazmanian, penelitian ini mengusulkan suatu model konseptual implementasi pendidikan inklusif yang bersifat adaptif. Model ini menempatkan kapasitas implementasi sekolah sebagai elemen kunci yang menghubungkan desain kebijakan dengan outcome kebijakan di tingkat layanan pendidikan.

Dalam model ini, proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif dipahami sebagai suatu alur yang terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah karakteristik masalah pendidikan inklusif, yang mencakup jenis kebutuhan khusus peserta didik serta kompleksitas hambatan belajar yang mereka hadapi. Karakteristik masalah tersebut menentukan tingkat kesulitan implementasi kebijakan di tingkat sekolah serta jenis dukungan pedagogis yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

Komponen kedua adalah desain kebijakan, yang dalam konteks penelitian ini diwujudkan melalui regulasi nasional dan kerangka normatif pendidikan inklusif. Desain kebijakan tersebut memberikan landasan hukum bagi sekolah untuk menerima siswa berkebutuhan khusus serta mengembangkan praktik pendidikan yang lebih inklusif. Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan penelitian, keberadaan regulasi formal tidak secara otomatis menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif.

Komponen ketiga, yang menjadi pusat dari model konseptual ini, adalah kapasitas implementasi sekolah. Kapasitas ini mencakup kompetensi profesional guru, kepemimpinan kepala sekolah, serta ketersediaan sumber daya pendukung yang memungkinkan sekolah untuk menerjemahkan mandat kebijakan menjadi praktik pembelajaran yang nyata. Penelitian ini menunjukkan bahwa variasi dalam kualitas implementasi pendidikan inklusif antar sekolah sangat dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas organisasi pada tingkat satuan pendidikan.

Kapasitas implementasi tersebut kemudian menentukan kualitas praktik pembelajaran inklusif adaptif yang berlangsung di ruang kelas. Praktik ini meliputi berbagai strategi pedagogis seperti diferensiasi pembelajaran, modifikasi metode evaluasi, serta penguatan interaksi sosial yang mendukung partisipasi siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar bersama siswa lainnya.

Pada tahap akhir, praktik pembelajaran inklusif tersebut menghasilkan outcome pendidikan inklusif, yang dalam penelitian ini tercermin melalui tiga indikator utama, yaitu peningkatan akses pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, kualitas layanan pembelajaran yang lebih adaptif, serta terbentuknya interaksi sosial yang lebih inklusif di lingkungan sekolah.

Secara konseptual, model implementasi pendidikan inklusif adaptif ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain kebijakan di tingkat pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendidikan dalam memperkuat kapasitas institusi pelaksana di tingkat sekolah. Dengan demikian, upaya penguatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif perlu diarahkan pada pengembangan kapasitas guru, kepemimpinan sekolah, serta dukungan sumber daya yang memungkinkan sekolah untuk menjalankan praktik pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik.



Gambar. 1 Gambar ini menunjukkan model konseptual implementasi pendidikan inklusif adaptif yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian. Model ini menempatkan karakteristik masalah sebagai titik awal perancangan kebijakan. Efektivitas implementasi dipengaruhi oleh kapasitas sekolah yang mencakup kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, serta ketersediaan sumber daya dan dukungan. Kapasitas tersebut kemudian diterjemahkan dalam praktik pembelajaran inklusif adaptif melalui diferensiasi pembelajaran, modifikasi evaluasi, dan pendampingan sosial, yang pada akhirnya menentukan outcome pendidikan inklusif berupa akses pendidikan, kualitas layanan pembelajaran, dan integrasi sosial di lingkungan sekolah.

Perbandingan Model Empiris dan Model Adaptif, serta Implikasi Kebijakan

Untuk memperjelas kontribusi penelitian terhadap pengembangan kebijakan pendidikan inklusif, perbandingan antara model empiris implementasi yang ditemukan di Kabupaten Bireuen dengan model implementasi adaptif yang diusulkan disajikan dalam bentuk matriks. Matriks ini tidak hanya menggambarkan perbedaan antara praktik implementasi yang berlangsung di lapangan dengan rancangan implementasi yang lebih sistematis, tetapi juga menunjukkan implikasi kebijakan yang dapat menjadi dasar bagi penguatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat daerah.

Tabel. 1 Perbandingan Model Empiris dan Model Adaptif Implementasi Pendidikan Inklusif, serta implikasinya bagi kebijakan eksisting

Dimensi Analisis	Model Empiris (Realitas Implementasi di Kabupaten Bireuen)	Model Adaptif (Rancangan Implementasi Pendidikan Inklusif)	Implikasi Kebijakan
Landasan Kebijakan	Implementasi didorong oleh regulasi nasional yang membuka akses pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.	Regulasi nasional diperkuat dengan kebijakan daerah dan pedoman operasional yang lebih spesifik bagi sekolah.	Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi turunan dan pedoman teknis implementasi pendidikan inklusif yang lebih operasional di

			tingkat sekolah.
Orientasi Implementasi	Implementasi bersifat inisiatif sekolah, sangat bergantung pada kebijakan internal dan kapasitas masing-masing sekolah.	Implementasi bersifat sistemik, dengan struktur pelaksanaan dan standar layanan yang lebih jelas.	Perlu dibangun sistem implementasi yang terstruktur, termasuk SOP layanan pendidikan inklusif pada tingkat satuan pendidikan.
Aktor Pelaksana Utama	Guru kelas reguler menjadi pelaksana utama karena ketiadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	Implementasi melibatkan tim layanan inklusi yang terdiri dari guru kelas, GPK, dan tenaga profesional pendukung.	Pemerintah daerah perlu memperkuat ketersediaan dan distribusi Guru Pembimbing Khusus (GPK) serta tenaga profesional pendukung pendidikan inklusif.
Kapasitas Implementasi	Kapasitas implementasi sangat bervariasi antar sekolah dan bergantung pada pengalaman serta komitmen individu guru.	Kapasitas sekolah diperkuat melalui pelatihan sistematis, pengembangan kompetensi guru, serta kepemimpinan sekolah yang adaptif.	Perlu program pelatihan dan pengembangan kapasitas guru secara berkelanjutan dalam bidang pedagogi inklusif.
Praktik Pembelajaran	Adaptasi pembelajaran dilakukan secara informal melalui diskresi guru, seperti penyederhanaan materi dan fleksibilitas evaluasi.	Pembelajaran dirancang secara inklusif dan adaptif, dengan strategi diferensiasi, modifikasi kurikulum, serta sistem evaluasi yang disesuaikan.	Perlu pengembangan panduan pembelajaran inklusif dan kurikulum adaptif yang dapat digunakan oleh guru di sekolah reguler.
Jejaring Dukungan	Kerja sama dengan lembaga eksternal masih terbatas dan bersifat informal.	Implementasi didukung oleh jejaring lintas sektor, seperti SLB sebagai resource center, layanan psikologi, serta organisasi masyarakat sipil.	Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme kolaborasi lintas sektor antara sekolah, SLB, layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat.
Outcome Implementasi	Kebijakan berhasil meningkatkan akses pendidikan, tetapi kualitas layanan masih bervariasi antar sekolah.	Kebijakan diharapkan menghasilkan akses pendidikan yang luas sekaligus kualitas layanan yang lebih konsisten dan inklusif.	Kebijakan pendidikan inklusif perlu diarahkan tidak hanya pada perluasan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Matriks perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen tidak terletak pada penerimaan sosial terhadap siswa berkebutuhan khusus, melainkan pada keterbatasan kapasitas sistem implementasi di tingkat sekolah. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pendidikan inklusif ke depan perlu difokuskan pada pembangunan kapasitas institusional sekolah, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan jejaring dukungan lintas sektor.

KESIMPULAN

1. implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen telah berhasil membuka akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) pada sekolah dasar reguler. Sebagian besar sekolah telah menerima siswa berkebutuhan

- husus dan memberikan kesempatan belajar bersama siswa reguler dalam satu lingkungan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan pendidikan inklusif telah mulai terinternalisasi dalam praktik pendidikan dasar di daerah penelitian.
2. karakteristik masalah pendidikan inklusif di sekolah sampel relatif berada pada tingkat hambatan ringan hingga sedang, seperti kesulitan belajar, slow learner, gangguan konsentrasi, serta hambatan sosial-emosional. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari perspektif tractability of the problem, implementasi pendidikan inklusif sebenarnya memiliki tingkat kemudahan yang cukup tinggi untuk dilaksanakan. Namun demikian, keterbatasan mekanisme identifikasi formal serta ketiadaan tenaga ahli seperti Guru Pembimbing Khusus (GPK) menyebabkan penanganan kebutuhan belajar siswa belum dapat dilakukan secara optimal.
 3. dimensi kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan implementasi, penelitian menemukan bahwa desain kebijakan pendidikan inklusif belum sepenuhnya mampu menyediakan kerangka implementasi yang kuat di tingkat sekolah. Regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum diikuti oleh pedoman teknis operasional yang rinci. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan guru, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan implementasi kebijakan sangat bergantung pada inisiatif dan kapasitas internal masing-masing sekolah.
 4. dimensi faktor eksternal non-hukum, implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen relatif didukung oleh penerimaan sosial masyarakat yang cukup baik. Orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya tidak menunjukkan resistensi yang signifikan terhadap keberadaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Namun demikian, dukungan kebijakan daerah, jejaring kerja sama lintas sektor, serta keterlibatan organisasi non-pemerintah masih tergolong terbatas sehingga belum mampu memperkuat sistem implementasi kebijakan secara menyeluruh.
 5. analisis policy–practice gap menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan normatif dengan praktik implementasi di lapangan. Kebijakan pendidikan inklusif secara formal menuntut adanya layanan pendidikan yang adaptif dan berkualitas bagi siswa berkebutuhan khusus, namun dalam praktiknya banyak sekolah masih menghadapi keterbatasan sumber daya, kompetensi teknis, serta dukungan kelembagaan.
 6. sintesis hasil penelitian, implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen dapat digambarkan melalui model empiris implementasi berbasis inisiatif sekolah, di mana pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kapasitas guru dan kepemimpinan kepala sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model implementasi pendidikan inklusif adaptif yang menempatkan kapasitas implementasi sekolah sebagai variabel kunci yang menghubungkan desain kebijakan dengan outcome implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ailulia, R., & Widiyono, A. (2021). Studi Kasus: Penangan Masalah School refusal melalui Teknik Self Instruction pada Anak Sekolah Dasar. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 7(1), 29–38. <https://doi.org/10.21067/JKI.V7I1.5728>
- Aladini, A. A. (2020). Inclusive Education from the Teachers' Perspectives in Palestine. *Creative Education*, 11(11), 2443–2457. <https://doi.org/10.4236/ce.2020.1111179>
- Alfaaroqi, K. U., & Khoiruddin, M. A. (2020). Implementasi Pendidikan Inklusif dan Kendalanya di SDN Betet 1 Kota Kediri. *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 22(1), 1–6. <https://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/psikologi/article/view/924>

- Alila, P. O., & Hyden, G. (2021). Teaching Public Policy in Kenya: Approaches and Current Issues. Dalam *Governing Kenya* (hlm. 299–318). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61784-4_17
- Amka. (2018). *Media Pembelajaran Inklusi* (I. Yuwono, Ed.). Nizamia Learning Center.
- ANTARA. (2010, Desember 4). *Aceh Daerah Percontohan Pendidikan Inklusi di Sumatera*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/236276/aceh-daerah-percontohan-pendidikan-inklusi-di-sumatera>
- ANTARA News. (2024, April 1). *Kemendikbudristek: 40.164 sekolah miliki siswa berkebutuhan khusus*. AntaraNews.com. <https://www.antaranews.com/berita/4038030/kemendikbudristek-40164-sekolah-miliki-siswa-berkebutuhan-khusus>
- Aranditio, S., Napitupulu, E. L., Irawati, D., & Utami, K. D. (2023, November 12). *Defisit Guru Pendamping Khusus Hambat Pendidikan Inklusi*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/12/defisit-guru-khusus-menghambat-pendidikan-inklusi>
- Arifa, F. N. (2024). *Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif* (Vol. XVI, No.3/I/Pusaka/Februari/2024; Bidang Kesejahteraan Rakyat).
- Arriani, F., Agustiyawati, Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Tulalessy, C., Herawati, F., & Maryanti, T. (2022). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Barreiro, F. (2017, September 3). *Towards new approaches and methods for poverty reduction in deprived urban areas*. Urbact EU Programme. <https://urbact.eu/articles/towards-new-approaches-and-methods-poverty-reduction-deprived-urban-areas>
- BBGP Jawa Timur. (2024, Maret 23). *Pendidikan berjenjang Pendidikan Inklusif: Terobosan Baru untuk Mewujudkan Kesetaraan Pendidikan*. Balai Besar Guru Penggerak. <https://bbgpjatim.kemdikbud.go.id/news/pendidikan-berjenjang-pendidikan-inklusi-terobosan-baru-untuk-mewujudkan-kesetaraan-pendidikan>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706QP063OA>
- Chomza, N. (2017). Kolaborasi Guru Reguler Dengan Guru Pendamping Khusus Dalam Layanan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi Kelas 1 SD Taman Muda Yogyakarta . *Jurnal Widia Ortodidaktika*, 6(3), 267–279.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications Ltd. <https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/the-sage-handbook-of-qualitative-research/book242504>
- Dwi, A. (2023, Agustus 19). *Media Pembelajaran dan Jenis-Jenisnya*. FKIP UMSU. <https://fkip.umsu.ac.id/media-pembelajaran-dan-jenis-jenisnya/>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Elmore, R. F. (1979). Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions. *Political Science Quarterly*, 94(4), 601–616. <https://doi.org/10.2307/2149628>
- Fauzan, H. N., Fransisca, L., Asrini, V. I., Fitria, I., & Firdaus, A. A. (2021). Sejarah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menuju Inklusi. *PENSA : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(3), 496–505.

- Ferizaldi, F., & Fazlina, F. (2020). Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bireuen. *HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 150–160. <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.24>
- Fikria, S. (2023, Juni 6). Dukungan Pemerintah untuk Sekolah Inklusi Masih Minim, Akademisi: Harusnya Ada Pendanaan Khusus. Radar Solo. <https://radarsolo.jawapos.com/pendidikan/841705923/dukungan-pemerintah-untuk-sekolah-inklusi-masih-minim-akademisi-harusnya-ada-pendanaan-khusus>
- Fitriani, F., Kurniati, N., Yusuf, D., & Mildasari. (2024). Peran Orangtua Dalam Memahami Pendidikan Inklusi di TK Negeri Pembina Batumandi. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 10(1), 417–426.
- Future Challenges in the Nordics. (2021). *Nordic Basic Schools as Past, Present and Future Sites for Solving the Challenges of Making Diverse Inclusive Knowledge-based Societies*. The Society of Swedish Literature in Finland. <https://futurenordics.org/projects/nordic-basic-schools-past-present-and-future-sites-solving-challenges-making-diverse>
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How Many Interviews Are Enough? *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
- Haekal, M. (2021). Analisis Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Aceh: Budaya, Kebijakan, dan Pelaksanaan. *Al-fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 117–130. <https://doi.org/10.0118/alfahim.v3i2.176>
- Hanjarwati, A., & Aminah, S. (2014). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi. *Inklusi*, 1(2), 221–248.
- Harian Analisa. (2016, Februari 15). Deklarasi Bireuen Kabupaten Pendidikan Inklusif. AnalisaDaily.com. <https://analisadaily.com/berita/arsip/2016/2/16/214183/deklarasi-bireuen-kabupaten-pendidikan-inklusi/>
- Harian Andalas. (2011, Juli 9). 20 Ribu Anak Aceh Ikut Pendidikan Inklusif. *Harian Andalas Edisi Cetak*, 14.
- Harian Waspada. (2018, Juni 25). Pendidikan Berkebutuhan Khusus, Salah Satu Prioritas Aceh. *Harian Waspada*. <https://waspadaaceh.com/pendidikan-berkebutuhan-khusus-salah-satu-prioritas-aceh/>
- Hata, A., Yuwono, J., Purwana, R., & Nomura, S. (2024). *Catatan Kebijakan Pendidikan Inklusif - Ringkasan Temuan Awal*.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Dalam *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (4th ed.). Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/studying-public-policy-9780199026142?cc=id&lang=en&>
- Indonesia Baik. (2024). Berapa Jumlah Sekolah di Indonesia 2023? . Menkominfo. <https://web.archive.org/web/20230601231931/https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-jumlah-sekolah-di-indonesia-2023>
- Jannah, A. M., Setiyowati, A., Lathif, K. H., Devi, N. D., & Akhmad, F. (2021). Model Layanan Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Anwarul*, 1(1), 121–136. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v1i1.51>
- Kompas. (2009, November 4). Pendidikan Inklusi Masih Banyak Kendala. Kompas.com. <https://edukasi.kompas.com/read/2009/11/04/0856498/pendidikan.inklusi.masih.banyak.kendala>